

**PEMERINTAH JAWA TIMUR**  
**TABEL 7.1 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN**

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SKPD PENANGGUNG JAWAB			
					2013	2019					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	<i>Misi 01: Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan</i>										
1	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja, dan penyerapan tenaga kerja	01	Memperluas kesempatan dan penyediaan lapangan kerja di pedesaan dan perkotaan	01	Peningkatan akses pencari kerja (angkatan kerja) terhadap lapangan kerja di sektor formal melalui pengembangan jejaring informasi pasar kerja, job fair, magang kerja, agar dapat meningkatkan penempatan tenaga kerja melalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)	001	% pencari kerja yg ditempatkan	58,41%	70%	[1.14.22] Program Perluasan dan Penempatan Kerja	[1140100] Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
					002	% TKI yg ditempatkan pada jabatan formal	35,49%	50%			
					003	rasio penyerapan tenaga kerja dari binaan di sektor informal	1/3	1/4			
		02	Meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kompetensi, serta ketrampilan tenaga kerja	01	Pengembangan usaha produktif melalui kewirausahaan sehingga tercipta tenaga kerja yang mandiri dan produktif	001	% tenaga kerja yg mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	80%	90%	[1.14.20] Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	[1140100] Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
					002	% tenaga kerja yg mendapatkan pelatihan kewirausahaan	29,47%	67%			
					003	% tenaga kerja yg mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	80%	85%			
				02	Optimalisasi dan pengembangan kapasitas dan pendayagunaan UPT Pelatihan Kerja (Balai Latihan Kerja) berstandar internasional, serta perluasan skala pelatihan keterampilan tenaga kerja yang berkualitas	001	% tenaga kerja yg mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	80%	90%	[1.14.20] Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	[1140100] Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
					002	% tenaga kerja yg mendapatkan pelatihan kewirausahaan	29,47%	67%			
					003	% tenaga kerja yg mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	80%	85%			
		03	Meningkatkan penempatan penduduk potensial di daerah transmigrasi	01	Peningkatan dan pengembangan kerja sama program transmigrasi dengan provinsi/kabupaten di luar Jawa	001	% kepemilikan dokumen kependudukan e-KTP	88,05%	95%	[1.10.15] Program Penataan Administrasi Kependudukan	[1140100] Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
					002	% kepemilikan dokumen kependudukan Akte Kelahiran	54%	95%			
					003	% kepemilikan dokumen kependudukan Akte Kematian	0,0%	95%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				001	% penempatan transmigran yg telah mendapat pelatihan (KK)	60%	70%	[2.08.18] Program Ketransmigrasian	[1140100] Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan		
				002	% transmigran yg berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosial (KK)	58,82%	70%				
				003	% Penduduk potensial yang mendapatkan pelatihan	35	55				
		04	Meningkatkan pengembangan kapasitas para santri pondok pesantren dalam bidang usaha produktif	01	Peningkatan pelatihan keterampilan kerja para santri pondok pesantren, termasuk bantuan sarana, unyuk melakukan usaha produktif	001	% tenaga kerja yg mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	80%	90%	[1.14.20] Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	[1140100] Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
						002	% tenaga kerja yg mendapatkan pelatihan kewirausahaan	29,47%	67%		
						003	% tenaga kerja yg mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	80%	85%		
		05	Meningkatkan perlindungan, pembinaan, dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang akan dan sedang bekerja di luar negeri	01	Peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja yang akan, dan sedang bekerja di luar negeri melalui pembinaan, perlindungan dan pengawasan terpadu	001	% pencari kerja yg ditempatkan	58,41%	70%	[1.14.22] Program Perluasan dan Penempatan Kerja	[1140100] Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
						002	% TKI yg ditempatkan pada jabatan formal	35,49%	50%		
						003	rasio penyerapan tenaga kerja dari binaan di sektor informal	1/3	1/4		
2	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	01	Meningkatkan iklim investasi dan ketenagakerjaan yang kondusif	01	Peningkatan investasi melalui perbaikan iklim investasi untuk menciptakan kesempatan kerja baru	001	Presentase penurunan perkara perselisihan hubungan industrial yg diselesaikan melalui perjanjian bersama	39,6%	55%	[1.14.18] Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	[1140100] Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
						002	% upah minimum terhadap kebutuhan hidup layak (KHL)	104,57%	109%		
				02	Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja, termasuk norma kerja, serta norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, dan menciptakan hubungan industrial yang kondusif	001	% kasus pelanggaran hukum di bidang norma ketenagakerjaan yg ditangani	75%	95%	[1.14.21] Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja	[1140100] Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
						002	% pekerja yg menjadi peserta program jamsostek aktif	44,3%	56%		
3	Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas	01	Meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan terjangkau	01	Peningkatan dan pengembangan secara bertahap Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun sebagai kelanjutan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	001	Angka Partisipasi Murni (APM)		98.1	[1.01.16] Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	[1010100] Dinas Pendidikan
				02	Penurunan/penghilangan hambatan administratif pemberian bantuan bagi sekolah umum, sekolah agama, sekolah kejuruan, dan sekolah khusus	001	Angka Partisipasi Kasar (APK)		83.44	[1.01.17] Program Pendidikan Menengah	[1010100] Dinas Pendidikan
						001	Angka Melek Huruf (AMH) pada usia 15 s/d 59 tahun		97.4	[1.01.18] Program Pendidikan Non Formal	[1010100] Dinas Pendidikan

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		02	Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sekolah Menengah Kejuruan	01	Peningkatan rasio perbandingan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Umum (SMU), 70% : 30%, untuk menyiapkan tenaga kerja terampil berpendidikan menengah.	001	Kabupaten/Kota yang telah memiliki lembaga penyelenggara Pendidikan Khusus (Inklusi)Kabupaten/Kota	11	38	[1.01.32] Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)	[1010100] Dinas Pendidikan
				02	Pengembangan "Sekolah Menengah Kejuruan Mini" atau Balai Latihan Kerja di pondok pesantren untuk menyiapkan tenaga kerja terampil tingkat menengah.	001	Kabupaten/Kota yang telah memiliki lembaga penyelenggara Pendidikan Khusus (Inklusi)Kabupaten/Kota	11	38	[1.01.32] Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)	[1010100] Dinas Pendidikan
				03	Peningkatan dan pengembangan penyediaan tambahan fasilitas dan program antara (bridging program) bagi lulusan sekolah kejuruan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi	001	Kabupaten/Kota yang telah memiliki lembaga penyelenggara Pendidikan Khusus (Inklusi)Kabupaten/Kota	11	38	[1.01.32] Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)	[1010100] Dinas Pendidikan
4	Meningkatnya kuantitas, dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD)	01	Meningkatkan aksesibilitas, dan kualitas PAUD	01	Pengembangan PAUD secara holistik dan terpadu	001	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	86,36	86,97	[1.01.15] Program Pendidikan Anak Usia Dini	[1010100] Dinas Pendidikan
				02	Peningkatan pemerataan dan akses PAUD, khususnya di daerah tertinggal, dan wilayah kepulauan	001	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	86,36	86,97	[1.01.15] Program Pendidikan Anak Usia Dini	[1010100] Dinas Pendidikan
				03	Peningkatan akses PAUD	001	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	86,36	86,97	[1.01.15] Program Pendidikan Anak Usia Dini	[1010100] Dinas Pendidikan
5	Meningkatnya mutu pendidikan, dan tenaga kependidikan	01	Meningkatkan kualitas, dan layanan pendidikan	01	Peningkatan mutu dan sebaran tenaga kependidikan secara merata	001	Jumlah guru yang telah memiliki kualifikasi D4/S1		79.34	[1.01.20] Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	[1010100] Dinas Pendidikan
				02	Peningkatan pendidikan non-formal berbasis komunitas	001	Jumlah guru yang telah memiliki kualifikasi D4/S1		79.34	[1.01.20] Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	[1010100] Dinas Pendidikan
				03	Peningkatan layanan pendidikan berbasis manajemen pendidikan secara komprehensif dan terintegrasi	001	Terjalannya kerjasama dan pemberian bantuan kepada Perguruan Tinggi dan lembaga penyelenggaraan Rintisan Wajar Pendidikan 15 Tahun	26	38	[1.01.23] Program Pendidikan Tinggi	[1010100] Dinas Pendidikan
				04	Peningkatan kualitas pendidikan pondok pesantren melalui bantuan penyelenggaraan pendidikan Diniyah, dan guru swasta	001	Terjalannya kerjasama dan pemberian bantuan kepada Perguruan Tinggi dan lembaga penyelenggaraan Rintisan Wajar Pendidikan 15 Tahun	26	38	[1.01.23] Program Pendidikan Tinggi	[1010100] Dinas Pendidikan
		02	Meningkatkan minat baca masyarakat	01	Peningkatan kuantitas sarana dan prasana perpustakaan, serta kapasitas kelembagaan secara terpadu	001	Indeks Minat dan Budaya Baca	56.05	66	[1.26.15] Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	[1260100] Badan Perpustakaan dan Kearsipan
						002	Indeks Kepuasan Masyarakat	78.45	78.75		
6	Meningkatnya kualitas peran pemuda, dan prestasi olahraga	01	Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas	01	Peningkatan kelembagaan karang taruna dan/atau organisasi lain yang berafiliasi dengan kepemudaan	001	Prosentase Pemuda berprestasi yang dibina		13,50	[1.18.16] Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	[1180100] Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
		02	Meningkatkan perlindungan bagi masa depan generasi muda	01	Peningkatan perlindungan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan Napza, minuman keras, dan penyebaran HIV/AIDS	001	Prosentase Pemuda berprestasi yang dibina		13,50	[1.18.16] Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	[1180100] Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
		03	Meningkatkan prestasi olahraga di berbagai event	01	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	001	Prosentase jumlah Atlet Pelajar Berprestasi yang dibina		0.85	[1.18.20] Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	[1180100] Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
7	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan, termasuk tenaga medis dan non-medis secara merata	01	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa, dan wilayah kepulauan	01	Peningkatan perluasan pelayanan kesehatan pondok bersalin desa (polindes) menjadi pondok kesehatan desa (ponkesdes) untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa, dan wilayah kepulauan	001	Cakupan Puskesmas dan Jaringannya sesuai standar	9	>35	[1.02.16] Program Upaya Kesehatan Masyarakat	[1020101] Dinas Kesehatan
					002	Cakupan Ponkesdes sesuai standar	44	>52			
					003	Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja	64	>68			
					004	Cakupan pelayanan kesehatan USILA	53	58			
					005	Cakupan Peserta KB Aktif	66	>70			
					006	Cakupan Pelayanan Bayi	95	>97			
					007	Prosentase Kasus Pasung ditangani	100	100			
					008	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Nakes	93	>97			
					001	Meningkatnya Pelayanan P2TB wilayah Binaan di RS. Paru Batu	60%	100%			[1020102] Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Batu
					001	Meningkatnya Pelayanan P2TB wilayah Binaan di RS. Paru Batu	75	100			[1020103] Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Jember
					001	(%) Angka keberhasilan pengobatan penyakit TB dan paru lainnya	0.7	0.8			[1020104] Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
					001	Terlaksananya Pemeriksaan dan Evaluasi Serologi di daerah endemis kusta	301				[1020105] Rumah Sakit Khusus Kusta Kediri
					001	Terlaksananya Pemeriksaan dan Evaluasi Serologi di daerah endemis kusta	301	300			[1020106] Rumah Sakit Khusus Kusta Sumberglagah Mojokerto
					001	Terjangkaunya pelayanan kesehatan mata yang berkualitas ke seluruh daerah di Provinsi Jawa Timur	40	100			[1020107] Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Surabaya
					002	terjangkaunya pelayanan kesehatan mata yang berkualitas ke seluruh daerah di provinsi jawa timur	20 prosen	70 prosen			
					001	Pencapaian target indikator nasional program penanggulangan pasien TB (9 indikator)	0.8	0.9			[1020109] Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) Pamekasan
					001	Jumlah masyarakat yang mendapatkan edukasi program TB	585	2480			[1020110] Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) Madiun
					001	Persentase kegiatan upaya kesehatan masyarakat yang terlaksana	100	552			[1020113] UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati
					001	Persentase pasien pasung terlayani		100			[1020600] Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				001	Meningkatnya sarana dan Prasarana RS. Paru Batu dengan Standar RS. sesuai Kemenkes	60%	100%	[1.02.47] Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	[1020102] Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Batu
				001	prosentase responden yang puas terhadap fasilitas/sarana prasarana RS yang tersedia	0.8105	92		[1020103] Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Jember
				001	(%) Capaian SPM Rumah Sakit Paru Dungus	0.722	0.9		[1020104] Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
				001	indeks kepuasan masyarakat	3,08	3.62		[1020105] Rumah Sakit Khusus Kusta Kediri
				001	Tingkat Pemenuhan sarana prasarana Rumah Sakit sesuai standar	0.55	0.9		[1020106] Rumah Sakit Khusus Kusta Sumberglagah Mojokerto
				001	Terpenuhinya sarana dan prasarana Rumah Sakit (Pembangunan Gedung Bedah, Pembangunan glaukoma center dan retinopat, gedung parkir diabetes juga servis area, beserta kebutuhan alkes dan penunjangnya termasuk mesin lasik)	40	100		[1020107] Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Surabaya
				001	Jumlah sarana dan prasarana, peralatan yang ada/jumlah sarana prasarana, peralatan sesuai standar pelayanan x 100%	0.65	0.85		[1020108] Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Timur Surabaya
				002	sarana prasarana rumah sakit sesuai standar	65	85		
				001	Pemenuhan pembangunan/rehabilitasi gedung RS dan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit	0.9	1		[1020109] Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) Pamekasan
				001	Persentase Pemenuhan peralatan dan perbekalan kesehatan sesuai SPM (5 thn)	33	100		[1020110] Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) Madiun
				001	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana Sumber daya manusia serta upaya kesehatan masyarakat dan terlaksanya kegiatan pengabdian masyarakat				[1020111] Akademi Keperawatan Madiun (Akper Madiun)
				001	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan BLUD	80	90		[1020112] Akademi Gizi Surabaya (AKZI SURABAYA)
				001	Persentase sarana prasarana dan peralatan sesuai dengan standar pelayanan	65	1		[1020113] UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati
				001	Pemanfaatan sarana prasarana oleh pelanggan	801.867	1.023.408		[1020200] Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				001	Prosentase pemenuhan sarana prasarana termasuk alat kedokteran RS	65	0.85	[1020300] Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang			
				001	Prosentase pemenuhan pengadaan, peningkatan sarana prasarana sesuai standart	95	92	[1020400] Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun			
				001	Kepuasan pasien/masyarakat dan pasien dampak asap rokok terhadap sarana prasarana RS	0.8	0.85	[1020500] Rumah Sakit Haji Surabaya			
				001	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	88	[1020600] Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya			
		02	Meningkatkan sarana dan prasarana RSUD, puskesmas dan jaringannya sesuai dengan standar kesehatan	01	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana RSUD, puskesmas, dan jaringannya sesuai dengan standar	001	Persentase Rumah Sakit terakreditasi	65	40	[1.02.33] Program Upaya Kesehatan Perorangan	[1020101] Dinas Kesehatan
				002	Persentase RSUD menyelenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) sesuai standar	50	30				
				003	Persentase RS yang menyelenggarakan Pelayanan IGD level 1 sesuai standar	75	>80				
				004	Berfungsinya Rumah Sakit Tersier sebagai TOP Referral > 50 %	50	50				
				001	Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin	95	100	[1.02.44] Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan	[1020101] Dinas Kesehatan		
				002	Persentase produk alat kesehatan yang memenuhi syarat	65	75				
				003	Persentase produk makanan yang memenuhi syarat	65	80				
				004	Persentase produk obat tradisional yang memenuhi syarat	60	70				
		03	Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan tenaga medis dan non-medis, serta perbekalan obat-obatan	01	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga medis dan non medis serta obat-obatan secara merata sesuai dengan standar kesehatan	001	Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin	95	100	[1.02.44] Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan	[1020101] Dinas Kesehatan
				002	Persentase produk alat kesehatan yang memenuhi syarat	65	75				
				003	Persentase produk makanan yang memenuhi syarat	65	80				
				004	Persentase produk obat tradisional yang memenuhi syarat	60	70				
				001	Rasio dokter spesialis, dokter umum dan bidan terhadap jumlah penduduk (Rasio x jumlah penduduk/100.000)	0	5	[1.02.46] Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan	[1020101] Dinas Kesehatan		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
8	Menurunnya angka kematian bayi, dan angka kematian ibu melahirkan	01	Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak, dan balita	01	Peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak dibawah lima tahun melalui penguatan dan pengembangan "Taman Posyandu" disetiap desa/kelurahan yang mengintegrasikan Posyandu, Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Bina Keluarga Balita (BKB).	001	Persentase rumah tangga sehat	46	62	[1.02.19] Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	[1020101] Dinas Kesehatan
					002	Prosentase Posyandu Puri	60	74			
					003	Persentase posyandu PURI yang menjadi taman posyandu	38	49			
					001	Prevalensi balita kurang gizi	12,1	10	[1.02.20] Program Perbaikan Gizi Masyarakat	[1020101] Dinas Kesehatan	
					002	Persentase Balita Stunting	29,2	25			
9	Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	01	Meningkatkan standar kualitas pelayanan RSUD, Puskesmas dan jaringannya	01	Peningkatan standarisasi pelayanan RSUD, puskesmas dan jaringannya secara merata	001	Persentase Rumah Sakit terakreditasi	65	40	[1.02.33] Program Upaya Kesehatan Perorangan	[1020101] Dinas Kesehatan
					002	Persentase RSUD menyelenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) sesuai standar	50	30			
					003	Persentase RS yang menyelenggarakan Pelayanan IGD level 1 sesuai standar	75	>80			
					004	Berfungsinya Rumah Sakit Tersier sebagai TOP Referral > 50 %	50	50			
					001	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Rumah Sakit	60%	100%	[1.02.48] Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	[1020102] Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Batu	
					001	tingkat kebutuhan kegiatan operasional rumah sakit	12 bulan	12		[1020103] Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Jember	
					001	Jumlah Kunjungan Pasien	11.711	61.243		[1020104] Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun	
					001	Bed Occupancy Rate (BOR)	46.3	62.1		[1020105] Rumah Sakit Khusus Kusta Kediri	
					001	Sarana, prasarana dan kebutuhan operasional Rumah Sakit terpenuhi	0.7	0.95		[1020106] Rumah Sakit Khusus Kusta Sumberglagah Mojokerto	
					001	Tersedianya kebutuhan operasional pelayanan kesehatan sehingga seluruh pasien terlayani dengan baik	100	100		[1020107] Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Surabaya	
					001	Persentase capaian SPM sesuai standar	0.5	0.7		[1020108] Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Timur Surabaya	
					002	Capaian SPM sesuai target	65	100			
					001	Persentase indeks kepuasan dan peningkatan jumlah kunjungan pasien rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat	0.85	0.95		[1020109] Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) Pamekasan	
					001	Jumlah pasien	8.000	13.250		[1020110] Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) Madiun	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				001	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2.6		[1020111] Akademi Keperawatan Madiun (Akper Madiun)			
				001	Terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan operasional BLUD bidang pendidikan, penelitian, dan Pengabdian Masyarakat	75	85	[1020112] Akademi Gizi Surabaya (AKZI SURABAYA)			
				001	Persentase capaian SPM sesuai target	80	100	[1020113] UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati			
				001	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2.6	3.25	[1020200] Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya			
				001	Prosentase penyelesaian pendidikan di RS	100	100	[1020300] Rumah Sakit Umum Dr. Syaiful Anwar Malang			
				002	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	100	100				
				003	Bed Occupancy Rate (BOR)	60-85	60-85				
				004	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	82,5				
				001	Prosentase pelayanan yang memenuhi standart pelayanan minimal	95	97	[1020400] Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun			
				001	Kepuasan pasien/masyarakat, karyawan dan Manajemen RS, terhadap kualitas pelayanan RS	0.8	0.85	[1020500] Rumah Sakit Haji Surabaya			
				001	Bed Occupancy Rate (BOR)	60,21	74	[1020600] Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya			
		02	Meningkatkan kesehatan masyarakat berbasis keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif	01	Peningkatan pelayanan Kesehatan komprehensif yang lebih mengedepankan upaya promotif preventif dengan tidak mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif	001	Persentase rumah tangga sehat	46	62	[1.02.19] Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	[1020101] Dinas Kesehatan
				002	Prosentase Posyandu Puri	60	74				
				003	Persentase posyandu PURI yang menjadi taman posyandu	38	49				
				001	prosentase akses masy memiliki akses thd jamban sehat	70	78	[1.02.21] Program Pengembangan Lingkungan Sehat	[1020101] Dinas Kesehatan		
				002	persentase akses masy memiliki akses thd sarana air minum yg mmenuhi syarat kesh	80	83				
				003	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sarana air minum layak/terlindung	81	85				
				004	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi dasar/jamban sehat	71	80				
				001	Persentase Penderita penyakit tidak menular tidak terjadi komplikasi	22	20	[1.02.49] Program Pengendalian Penyakit	[1020101] Dinas Kesehatan		



1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				002	Persentase KLB Pasca Bencana	0	0				
				003	Persentase RFT Rate	90	93				
				004	Persentase ODHA dengan ARV	71	90				
				005	Persentase penderita Malaria mendapatkan ACT	99,81	95				
				006	Persentase penderita suspect yang tertangani	100	100				
				007	Insiden rate DBD	39	<51				
				008	Persentase penyakit menular wabah dilakukan PE	100	100				
				009	Persentase cakupan Diare	70	95				
				010	Persentase penurunan KLB penyakit bersumber binatang	16	5				
				011	Persentase keberhasilan pengobatan TB	90	95				
				012	Persentase Cakupan Pneumonia	30	50				
10	Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan	01	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan kesehatan melalui mekanisme Jamkesta (Jaminan Kesehatan Semesta) yang komprehensif dan terpadu	01	Pengembangan jaminan kesehatan semesta bagi seluruh penduduk Jawa Timur	001	Persentase termanfaatkannya dokumen kesehatan untuk bahan penentuan kebijakan	100	100	[1.02.34] Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	[1020101] Dinas Kesehatan
						001	Meningkatnya Manajemen Pelayanan RS.	60%	100%		[1020102] Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Batu
		02	Meningkatkan layanan kesehatan bagi penduduk miskin	01	Peningkatan upaya meminimalkan hambatan keuangan bagi penduduk miskin dan rentan dalam mengakses memanfaatkan pelayanan kesehatan.	001	Cakupan Puskesmas dan Jaringannya sesuai standar	9	>35	[1.02.16] Program Upaya Kesehatan Masyarakat	[1020101] Dinas Kesehatan
						002	Cakupan Ponkesdes sesuai standar	44	>52		
						003	Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja	64	>68		
						004	Cakupan pelayanan kesehatan USILA	53	58		
						005	Cakupan Peserta KB Aktif	66	>70		
						006	Cakupan Pelayanan Bayi	95	>97		
						007	Prosentase Kasus Pasung ditangani	100	100		
						008	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Nakes	93	>97		
						001	Meningkatnya Pelayanan P2TB wilayah Binaan di RS. Paru Batu	60%	100%		[1020102] Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Batu
						001	Meningkatnya Pelayanan P2TB wilayah Binaan di RS. Paru Batu	75	100		[1020103] Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Jember
						001	(%) Angka keberhasilan pengobatan penyakit TB dan paru lainnya	0.7	0.8		[1020104] Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun
						001	Terlaksananya Pemeriksaan dan Evaluasi Serologi di daerah endemis kusta	301			[1020105] Rumah Sakit Khusus Kusta Kediri

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				001	Terlaksananya Pemeriksaan dan Evaluasi Serologi di daerah endemis kusta	301	300	[1020106] Rumah Sakit Khusus Kusta Sumberglagah Mojokerto			
				001	Terjangkaunya pelayanan kesehatan mata yang berkualitas ke seluruh daerah di Provinsi Jawa Timur	40	100	[1020107] Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Surabaya			
				002	terjangkaunya pelayanan kesehatan mata yang berkualitas ke seluruh daerah di provinsi jawa timur	20 prosen	70 prosen				
				001	Pencapaian target indikator nasional program penanggulangan pasien TB (9 indikator)	0.8	0.9	[1020109] Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) Pamekasan			
				001	Jumlah masyarakat yang mendapatkan edukasi program TB	585	2480	[1020110] Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) Madiun			
				001	Persentase kegiatan upaya kesehatan masyarakat yang terlaksana	100	552	[1020113] UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati			
				001	Persentase pasien pasung terlayani		100	[1020600] Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya			
11	Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana (KB), dan pelayanan kesehatan reproduksi	01	Meningkatkan layanan KB, dan kesehatan reproduksi secara komprehensif dan berkelanjutan	01	Peningkatan dan penguatan revitalisasi program keluarga berencana untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga.	001	Cakupan Puskesmas dan Jaringannya sesuai standar	9	>35	[1.02.16] Program Upaya Kesehatan Masyarakat	[1020101] Dinas Kesehatan
				002	Cakupan Ponkesdes sesuai standar	44	>52				
				003	Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja	64	>68				
				004	Cakupan pelayanan kesehatan USILA	53	58				
				005	Cakupan Peserta KB Aktif	66	>70				
				006	Cakupan Pelayanan Bayi	95	>97				
				007	Prosentase Kasus Pasung ditangani	100	100				
				008	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Nakes	93	>97				
				001	Meningkatnya Pelayanan P2TB wilayah Binaan di RS. Paru Batu	60%	100%	[1020102] Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Batu			
				001	Meningkatnya Pelayanan P2TB wilayah Binaan di RS. Paru Batu	75	100	[1020103] Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Jember			
				001	(%) Angka keberhasilan pengobatan penyakit TB dan paru lainnya	0.7	0.8	[1020104] Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Dungus Madiun			
				001	Terlaksananya Pemeriksaan dan Evaluasi Serologi di daerah endemis kusta	301		[1020105] Rumah Sakit Khusus Kusta Kediri			
				001	Terlaksananya Pemeriksaan dan Evaluasi Serologi di daerah endemis kusta	301	300	[1020106] Rumah Sakit Khusus Kusta Sumberglagah Mojokerto			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				001	Terjangkaunya pelayanan kesehatan mata yang berkualitas ke seluruh daerah di Provinsi Jawa Timur	40	100		[1020107] Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Surabaya		
				002	terjangkaunya pelayanan kesehatan mata yang berkualitas ke seluruh daerah di provinsi jawa timur	20 prosen	70 prosen				
				001	Pencapaian target indikator nasional program penanggulangan pasien TB (9 indikator)	0.8	0.9		[1020109] Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) Pamekasan		
				001	Jumlah masyarakat yang mendapatkan edukasi program TB	585	2480		[1020110] Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) Madiun		
				001	Persentase kegiatan upaya kesehatan masyarakat yang terlaksana	100	552		[1020113] UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati		
				001	Persentase pasien pasung terlayani		100		[1020600] Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya		
12	Menurunnya persentase penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan	01	Meningkatkan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan lintas dan antar sektor dengan lokasi dan sasaran tertentu "lokus-fokus"	01	Peningkatan dan penyempurnaan pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan di semua program yang ada di satuan kerja pemerintah daerah (SKPD), sekaligus memperbaiki efektivitas program	001	Persentase (%) orang atau kelompok yang memperoleh program pemberdayaan sosial (SPM: 80%)	68	73	[1.13.35] Program Pemberdayaan Sosial	[1130100] Dinas Sosial
				02	Peningkatan dan penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan yang ditujukan untuk memangkas beban pengeluaran rumah tangga miskin	001	Persentase (%) orang atau kelompok yang memperoleh program pemberdayaan sosial (SPM: 80%)	68	73	[1.13.35] Program Pemberdayaan Sosial	[1130100] Dinas Sosial
				03	Peningkatan, dan penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk bantuan sosial, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin	001	Prosentase Desa/Kel. Yang telah menerapkan Sistim Manajemen Perencanaan Partisipatif (SMPP)	75	95	[1.22.17] Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	[1220100] Badan Pemberdayaan Masyarakat
		02	Meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil untuk menurunkan tingkat kemiskinan	01	Pengembangan dan perlindungan keberlangsungan usaha mikro dan kecil sektor informal di perkotaan maupun pedesaan untuk mencegah terjadinya pemiskinan lebih parah akibat kehilangan sumber nafkah	001	Prosentase lembaga ekonomi desa yang terfasilitasi pengembangan usahanya	50	85	[1.22.23] Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat	[1220100] Badan Pemberdayaan Masyarakat
		03	Meningkatkan kualitas manajemen Kelompok Usaha Bersama (Kube)	01	Peningkatan kualitas manajemen Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang memiliki kemampuan dan keberdayaan secara sosial maupun secara ekonomi	001	Persentase (%) orang atau kelompok yang memperoleh program pemberdayaan sosial (SPM: 80%)	68	73	[1.13.35] Program Pemberdayaan Sosial	[1130100] Dinas Sosial
				001	Dukungan Layanan Lingkup Administrasi Kemasyarakatan	70	90	[1.20.83] Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan	[1200308] Biro Administrasi Kemasyarakatan		

1	2	3		4		5		6	7	8	9
		04	Mengoptimalkan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	01	Peningkatan keberdayaan masyarakat miskin sebagai aktor perubahan sosial yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya dalam menanggulangi kemiskinan mereka sendiri melalui konsep dan metode belajar sosial	001	Prosentase Desa/Kel. Yang telah menerapkan Sistem Manajemen Perencanaan Partisipatif (SMPP)	75	95	[1.22.17] Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	[1220100] Badan Pemberdayaan Masyarakat
						001	Jumlah Komunitas masyarakat yang mampu mendayagunakan dan memanfaatkan SDA dan TTG	47	90	[1.22.22] Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Pemanfaatan TTG dan Pendayagunaan SDA	[1220100] Badan Pemberdayaan Masyarakat
						001	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan (LPMD/K dan TP PKK) yang aktif	50	85	[1.22.24] Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	[1220100] Badan Pemberdayaan Masyarakat
		05	Meningkatkan akses dan fasilitas infrastruktur bagi penduduk miskin	01	Peningkatan perluasan akses penduduk miskin terhadap kredit mikro dengan suku bunga rendah	001	Prosentase lembaga ekonomi desa yang terfasilitasi pengembangan usahanya	50	85	[1.22.23] Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat	[1220100] Badan Pemberdayaan Masyarakat
				02	Peningkatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan yang menghubungkan tempat produksi pertanian dan tujuan pasar untuk menekan biaya angkut, yang dapat meningkatkan pendapatan penduduk miskin	001	Jumlah Komunitas masyarakat yang mampu mendayagunakan dan memanfaatkan SDA dan TTG	47	90	[1.22.22] Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Pemanfaatan TTG dan Pendayagunaan SDA	[1220100] Badan Pemberdayaan Masyarakat
13	Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	01	Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi PMKS	01	Peningkatan kualitas hidup PMKS, dan peran aktif masyarakat dalam penanganan kesejahteraan sosial	001	Prosentase (%) lembaga atau kelompok yang memperoleh program pemberdayaan kelembagaan keajahteraan sosial (SPM: 60%)	58%	64	[1.13.21] Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	[1130100] Dinas Sosial
						001	Persentase (%) orang atau kelompok yang memperoleh program pemberdayaan sosial (SPM: 80%)	68	73	[1.13.35] Program Pemberdayaan Sosial	[1130100] Dinas Sosial
						001	Persentase (%) Orang atau Kelompok yang memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi sosial (SPM 80%)	75	86	[1.13.36] Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	[1130100] Dinas Sosial
						001	Persentase pemahaman tentang peraturan perundangan penyelenggaraan undian dan pengumpulan sumbangan, terlindunginya korban tindak kekerasan dan anak bermasalah dengan hukum secara sosial dan psikologis, terjaminnya ibu hamil dan anak usia sekolah dari keluarga miskin.	57	62	[1.13.37] Program Bantuan dan Perlindungan Sosial	[1130100] Dinas Sosial

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				001	Prosentase (%) orang atau Kelompok yg memperoleh kesejahteraan sosial	50	50	[1.13.39] Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial	[1130100] Dinas Sosial
				001	Persentase (%) Panti Sosial yang menangani klien PMKS sesuai target (SPM 60%)	70	80	[1.13.41] Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti Sosial	[1130100] Dinas Sosial
				001	persentase peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial			[1.13.42] Program Peningkatan Perencanaan Kesejahteraan Sosial	[1130100] Dinas Sosial
14	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	01	Meningkatkan kualitas keadilan dan kesetaraan gender di segala sektor pembangunan	01	Peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan melalui upaya-upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan	73	2	[1.11.15] Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	[1110100] Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
				001	Prosentase Kabupaten/Kota yang memiliki Peraturan Perundangan yang mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Anak (PUA)	15	10	[1.11.16] Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	[1110100] Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
				002	Prosentase Kab/Kota yang membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja-PUG)	75			
				001	Prosentase Penanganan Korban KDRT, Non KDRT, dan Trafficking yang melapor dan dilayani oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)	100	100	[1.11.17] Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	[1110100] Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
				001	Prosentase Partisipasi Perempuan Didalam Lembaga Pemerintah	22,13	20	[1.11.18] Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	[1110100] Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
				001	Jumlah Akseptor Baru	793	1000	[1.12.17] Program Pelayanan Kontrasepsi	[1110100] Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
				001	Jumlah Pelayanan Informasi dan Konseling (PIK) Remaja Tahap Tegar		100	[1.12.20] Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	[1110100] Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
				001	Jumlah Kader Taman Posyandu yang dilatih tentang Perlindungan Anak	76	500	[1.12.24] Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	[1110100] Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
				001	Cakupan KB Aktif	62,40	67	[1.12.25] Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	[1110100] Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	<b>Misi 02: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi</b>										
1	Meningkatnya volume usaha UMKM, dan kualitas kelembagaan koperasi	01	Memperluas akses permodalan bagi UMKM melalui lembaga keuangan bank maupun non-bank	01	Perluasan jaringan akses permodalan UMKM melalui peran stimulasi pemerintah sebagai stimulan, lembaga keuangan bank dan non-bank, dengan mengutamakan pendampingan kepada UMK untuk kelancaran pembiayaan usaha	001	Perputaran modal Kopwan (kali per tahun)	2	2,5	[1.15.17] Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	[1150100] Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah
				03	Peningkatan perluasan jaringan Bank UMKM di wilayah-wilayah strategis untuk mendukung kemudahan akses permodalan	001	Pertumbuhan Omzet Usaha Mikro yang ada di Sentra (%)	-	5,00	[1.15.19] Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro	[1150100] Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah
		02	Meningkatkan peran UMKM dan koperasi dalam aktivitas ekonomi	01	Perluasan cakupan kelompok sasaran, substansi pendidikan dan pelatihan UMKM untuk efisiensi dan efektivitas proses usaha, termasuk manajemen pemasaran	001	Jumlah UMKM yg mendapatkan legalisasi usaha (unit)	300	1.000	[1.15.15] Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	[1150100] Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah
				02	Optimalisasi peran UMKM terhadap pembentukan PDRB, dan penciptaan lapangan kerja melalui fasilitasi skema pembiayaan, peningkatan daya saing, perluasan dan penguatan kelembagaan, serta peningkatan usaha koperasi	001	Return SHU Koperasi terhadap Volume (%)	6	12	[1.15.21] Program Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi	[1150100] Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah
				03	Penyediaan dan perluasan akses pasar bagi UMKM dengan mengutamakan tujuan pasar dalam negeri, selanjutnya didorong untuk mampu bersaing ke pasar internasional	001	Pertumbuhan Wirausaha Baru (%)	-	10,00	[1.15.16] Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	[1150100] Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah
				04	Peningkatan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pembinaan sentra-sentra produksi/klaster disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang makin memadai	001	Pertumbuhan Omzet Usaha Mikro yang ada di Sentra (%)	-	5,00	[1.15.19] Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro	[1150100] Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah
				05	Peningkatan dan pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) pedesaan untuk mendukung pengembangan koperasi, serta usaha mikro dan kecil	001	Pertumbuhan Omzet Usaha Mikro yang ada di Sentra (%)	-	5,00	[1.15.19] Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro	[1150100] Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah
				06	Peningkatan kualitas SDM pengelola koperasi melalui pelatihan untuk mendukung pengembangan koperasi	001	Persentase koperasi aktif (%)	79,23	81,03	[1.15.18] Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	[1150100] Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah
2	Meningkatnya jumlah wirausaha baru (WUB)	01	Meningkatkan inkubasi kewirausahaan bagi calon wirausaha baru	01	Peningkatan tumbuhnya wirausaha kelas menengah baru yang bergerak di sektor UMKM melalui pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha, serta akses permodalan	001	Pertumbuhan Wirausaha Baru (%)	-	10,00	[1.15.16] Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	[1150100] Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah

1	2	3		4		5		6	7	8	9
3	Meningkatnya volume usaha ekonomi kaum perempuan	01	Meningkatkan kualitas ekonomi produktif berbasis gender dalam pemenuhan hak-hak dasar untuk mencegah feminisasi kemiskinan	01	Peningkatan dan perluasan jaringan usaha, dan akses permodalan (kredit usaha) bagi perempuan melalui pengembangan lembaga keuangan non-perbankan	001	Perputaran modal Kopwan (kali per tahun)	2	2,5	[1.15.17] Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	[1150100] Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah
				02	Peningkatan peran perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif, melalui berbagai pelatihan keterampilan, dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha ekonomi perempuan	001	Perputaran modal Kopwan (kali per tahun)	2	2,5	[1.15.17] Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	[1150100] Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah
				03	Penguatan manajemen kelembagaan ekonomi perempuan untuk meningkatkan efisiensi skala usaha ekonomi kaum perempuan	001	Perputaran modal Kopwan (kali per tahun)	2	2,5	[1.15.17] Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	[1150100] Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah
				04	Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka penguatan dan pengembangan ekonomi kaum perempuan	001	Perputaran modal Kopwan (kali per tahun)	2	2,5	[1.15.17] Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	[1150100] Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah
4	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan)	01	Meningkatkan kualitas intensifikasi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan)	01	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian untuk meningkatkan surplus bahan pangan, khususnya padi, jagung, kedelai, gula, daging, telur, susu, dan ikan, untuk memenuhi konsumsi dan bahan baku industri pengolahan (agroindustri).	001	Jumlah produksi Padi (Ton)	12.049.405	13,122,446	[2.01.37] Program peningkatan Produksi Pertanian	[2010100] Dinas Pertanian
						002	Jumlah produksi Jagung (Ton)	5.760.959	7,607,112		
						003	Jumlah produksi Kedelai (Ton)	329.461	539,250		
						004	Jumlah produksi Sayuran (Ton)	1.764.874	2,282,360		
						005	Jumlah Produksi Buah-buahan (Ton)	4.105.173	4.223.139		
						001	Produksi tanaman perkebunan Tebu (Ton)	1.240.050	1.390.000	[2.01.38] Program peningkatan Produksi Perkebunan	[2010200] Dinas Perkebunan
						002	Produksi tanaman perkebunan Kopi (Ton)	56.525	70.000		
						003	Produksi tanaman perkebunan Kakao (Ton)	39.200	51.000		
						001	Produksi Daging (Ton)	350.612	396.665	[2.01.39] Program peningkatan Produksi Peternakan	[2010300] Dinas Peternakan
						002	Produksi Telur (Ton)	340.232	391.384		
						003	Produksi Susu (Ton)	420.991	462.219		
						001	Produksi Kayu Hutan Negara (m3)	400.000	400.000	[2.02.15] Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	[2020100] Dinas Kehutanan
						002	Produksi Getah Pinus (ton)	25.000	33.122,42		
						003	Produksi Getah Damar (ton)	200	216,49		
						004	Produksi Daun Kayu Putih (ton)	14.000	15.154,05		
						005	Produksi Porang (Ton)	2.000	2.164,86		
						001	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	979309	1464325	[2.05.20] Program Pengembangan Budidaya Perikanan	[2050100] Dinas Perikanan dan Kelautan

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				001	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	389559	414193	[2.05.21] Program Pengembangan Perikanan Tangkap	[2050100] Dinas Perikanan dan Kelautan		
		03	Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir	01	Pengembangan sarana prasarana dan kapasitas nelayan, serta usaha ekonomi produktif masyarakat kawasan pesisir, dan kepulauan	001	Produksi garam rakyat (Ribu Ton)	620.95	1051	[2.05.34] Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat	[2050100] Dinas Perikanan dan Kelautan
		04	Meningkatkan pengembangan aneka usaha di kawasan hutan, dan usaha hutan rakyat	01	Perluasan areal hutan rakyat, dan pemanfaatan lahan bawah tegakan, sekitar hutan, serta pengembangan usaha non-kayu di kawasan hutan	001	Produksi Kayu Hutan Negara (m3)	400.000	400.000	[2.02.15] Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	[2020100] Dinas Kehutanan
						002	Produksi Getah Pinus (ton)	25.000	33.122,42		
						003	Produksi Getah Damar (ton)	200	216,49		
						004	Produksi Daun Kayu Putih (ton)	14.000	15.154,05		
						005	Produksi Porang (Ton)	2.000	2.164,86		
5	Meningkatnya nilai tambah hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan)	01	Meningkatkan usaha penanganan pasca-panen, dan pengolahan hasil pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan)	01	Peningkatan nilai tambah (value added) sektor pertanian melalui perluasan penciptaan kawasan agropolitan dan agroindustri yg memiliki keterkaitan ke belakang (backward linkage) dan ke depan (forward linkage) pada sebaran lokasi potensial yang merata	001	persentase nilai tambah usaha tani tanaman pangan (padi)	64,72	64,72	[2.01.40] Program Pengembangan Agribisnis Pertanian	[2010100] Dinas Pertanian
						001	Prosentase peningkatan nilai tambah komoditi perkebunan (kopi arabika)		17,36	[2.01.41] Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan	[2010200] Dinas Perkebunan
						002	Prosentase peningkatan nilai tambah komoditi perkebunan (kakaο)		7,94		
						001	Persentase nilai tambah produk peternakan (daging sapi)	20-30	20-30	[2.01.42] Program Pengembangan Agribisnis Peternakan	[2010300] Dinas Peternakan
						001	Persentase nilai tambah produk perikanan	30	60	[2.05.33] Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	[2050100] Dinas Perikanan dan Kelautan
				02	Pengembangan dan pemberdayaan agroindustri berbasis industri kerakyatan yang memanfaatkan hasil pertanian setempat yang dapat menyerap tenaga kerja	001	persentase nilai tambah usaha tani tanaman pangan (padi)	64,72	64,72	[2.01.40] Program Pengembangan Agribisnis Pertanian	[2010100] Dinas Pertanian
						001	Prosentase peningkatan nilai tambah komoditi perkebunan (kopi arabika)		17,36	[2.01.41] Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan	[2010200] Dinas Perkebunan
						002	Prosentase peningkatan nilai tambah komoditi perkebunan (kakaο)		7,94		
						001	Persentase nilai tambah produk peternakan (daging sapi)	20-30	20-30	[2.01.42] Program Pengembangan Agribisnis Peternakan	[2010300] Dinas Peternakan
						001	Persentase nilai tambah produk perikanan	30	60	[2.05.33] Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	[2050100] Dinas Perikanan dan Kelautan



1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		02	Meningkatkan kualitas proses dan produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan) yang terstandarisasi	01	Peningkatan daya saing produk pertanian, dengan tetap melakukan perlindungan produk lokal, melalui peningkatan kualitas menuju standar mutu yang dipersyaratkan pada berbagai kawasan perdagangan	001	persentase nilai tambah usaha tani tanaman pangan (padi)	64,72	64,72	[2.01.40] Program Pengembangan Agribisnis Pertanian	[2010100] Dinas Pertanian
						001	Prosentase peningkatan nilai tambah komoditi perkebunan (kopi arabika)		17,36	[2.01.41] Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan	[2010200] Dinas Perkebunan
						002	Prosentase peningkatan nilai tambah komoditi perkebunan (kakao)		7,94		
						001	Persentase nilai tambah produk peternakan (daging sapi)	20-30	20-30	[2.01.42] Program Pengembangan Agribisnis Peternakan	[2010300] Dinas Peternakan
						001	Persentase nilai tambah produk perikanan	30	60	[2.05.33] Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	[2050100] Dinas Perikanan dan Kelautan
6	Meningkatnya akses petani dan nelayan terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran dan permodalan sehingga memiliki daya saing tinggi	01	Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan petani dan nelayan secara berkelanjutan dan terpadu	01	Optimalisasi dan pemberdayaan kelembagaan petani/nelayan untuk meningkatkan akses petani/nelayan terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan.	001	Jumlah tenaga penyuluh bersertifikasi (orang)	295	533	[1.21.25] Program pemberdayaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan	[1210100] Badan Ketahanan Pangan
						002	Jumlah kelompok tani yang mengalami peningkatan kemampuan kelas kelompok	361	459		
						001	Jumlah kelompok petani yang menerapkan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) (Kelompok)	155	272	[2.01.43] Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Pertanian	[2010100] Dinas Pertanian
						001	Persentase peningkatan pemberdayaan petani perkebunan	2,5	5	[2.01.44] Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Perkebunan	[2010200] Dinas Perkebunan
						001	Jumlah kelompok peternak yang mengalami peningkatan kelas kemampuan kelompok	39	97	[2.01.45] Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Peternakan	[2010300] Dinas Peternakan
						001	Jumlah kelompok yang terakses (kelompok)	5.402	6.751	[2.05.31] Program peningkatan kapasitas Pelaku Usaha Perikanan	[2050100] Dinas Perikanan dan Kelautan
7	Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat (food availability) dan akses pangan (food acces)	01	Meningkatkan stok pangan masyarakat dan stabilisasi harga	01	Pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, antara lain meliputi daging, beras, gula, kedelai, dan jagung	001	Ketersediaan Pangan Beras (Ton)	7.309.527	7.897.877	[1.21.24] Program Peningkatan Ketahanan pangan	[1210100] Badan Ketahanan Pangan
						002	Ketersediaan Pangan Jagung (Ton)	5.126.943	6.769.955		
						003	Ketersediaan Pangan Kedelai (Ton)	311.767	520.434		
						004	Ketersediaan Pangan Daging (Ton)	333.082	390.762		
						005	Ketersediaan Pangan Telur (Ton)	323.220	384.876		
						006	Ketersediaan Pangan Susu (Ton)	392.682	444.856		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				007	Ketersediaan Pangan Ikan (Ton)	1.327.802	1.724.478				
				008	Ketersediaan Pangan Gula (Ton)	1.227.898	1.376.378				
				009	Stabilnya harga pangan (beras) di tingkat konsumen (%)	CV<10%	CV<10%				
				010	Cadangan Pangan Pemerintah (Beras) (Ton)	196	200				
				011	Stabilnya harga pangan (gabah) di tingkat produsen	Sesuai HPP	Sesuai HPP				
				012	Penurunan wilayah rawan pangan (%)	2	2				
8	Meningkatnya penyerapan pangan (food utilization)	01	Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan	01	Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) berbasis pangan lokal	001	Skor PPH	81,1	87,7	[1.21.26] Program Peningkatan Diversifikasi Pangan	[1210100] Badan Ketahanan Pangan
9	Meningkatnya volume ekspor dalam dan luar negeri	01	Memperkuat dan memperluas pasar dalam dan luar negeri	01	Peningkatan akses dan penetrasi ke pasar domestik melalui perluasan dan penguatan fungsi Kantor Perwakilan Dagang	001	Net Ekspor Perdagangan Dalam Negeri (Trilyun Rupiah)	70,42	627,93	[2.06.18] Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	[2070100] Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		02	Meningkatkan kerja sama ekonomi lokal, regional dan internasional	01	Optimalisasi akses dan penetrasi ke pasar ekspor konvensional, dan perluasan pasar ekspor non-konvensional	001	Net ekspor non migas (Milyar US\$)	-3,17	14,51	[2.06.22] Program Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor	[2070100] Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		03	Meningkatkan daya saing Produk berbasis keunggulan lokal	01	Revitalisasi Puspa Agro menjadi trading house produk pertanian Jawa Timur	001	Jumlah standardisasi mutu barang dan alat ukur (unit)	948.258	5.776.696	[2.06.15] Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	[2070100] Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				02	Perluasan dan peningkatan substansi pameran dagang produk UMKM di pasar domestik maupun internasional	001	Net Ekspor Perdagangan Dalam Negeri (Trilyun Rupiah)	70,42	627,93	[2.06.18] Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	[2070100] Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				03	Peningkatan performa standarisasi Industri	001	Jumlah IKM yang mendapat fasilitas standardisasi industri (unit)	2.154	17.165	[2.07.33] Program Peningkatan Standarisasi Industri	[2070100] Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		04	Mengembangkan bahan baku substitusi impor	01	Peningkatan produk bahan baku/penolong domestik sebagai bahan pengganti/substitusi impor	001	Net ekspor non migas (Milyar US\$)	-3,17	14,51	[2.06.22] Program Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor	[2070100] Dinas Perindustrian dan Perdagangan
10	Meningkatnya kontribusi sektor industri	01	Meningkatkan pengembangan sektor industri	01	Peningkatan fasilitas pengembangan industri kecil dan menengah non-agro yang memiliki daya penyebaran dan kepekaan tinggi, atau yang memiliki backward dan forward linkage yang tinggi	001	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitas untuk peningkatan daya saing (unit)	3.980	8.632	[2.07.16] Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	[2070100] Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				02	Peningkatan fasilitas kerangka regulasi usaha skala menengah dan besar dan mendorong kemitraan usaha dengan pelaku mikro dan kecil	001	Jumlah IKM yang mendapatkan pelayanan teknis (unit)	8.271	61.101	[2.07.31] Program Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri	[2070100] Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				03	Peningkatan fasilitas penumbuhkembangan industri pengolahan agro dan non-agro	001	Luas kawasan industri yang terpakai (Ha)	1.758	2.356	[2.07.18] Program Penataan Struktur Industri	[2070100] Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				001	Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan (unit)	1.594	11.776	[2.07.32] Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	[2070100] Dinas Perindustrian dan Perdagangan		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				001	Jumlah IKM yang mendapat fasilitas standarisasi industri (unit)	2.154	17.165	[2.07.33] Program Peningkatan Standarisasi Industri	[2070100] Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
				001	Nilai produksi industri agro (Triliun Rupiah)	221,93	1.201,59	[2.07.34] Program Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam	[2070100] Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
11	Meningkatnya kunjungan wisata	01	Meningkatkan sektor pariwisata secara integratif, dan berdaya saing global	01	Peningkatan pengembangan destinasi pariwisata melalui perluasan pengembangan objek wisata alam dan buatan	001	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	300909	1981190	[2.04.15] Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	[1170100] Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				02	Peningkatan cakupan substansi pameran produk pariwisata di pasar domestik dan internasional	001	Jumlah penerimaan devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara	232,90	1.351.16	[2.04.16] Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	[1170100] Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				002	Kontribusi kepariwisataan terhadap PDRB Jatim (%)	7,75	8,19				
				03	Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana penunjang destinasi pariwisata	001	Jumlah tenaga kerja yang sudah dilatih disektor formal dan non formal kepariwisataan	715	1.267	[2.04.20] Program Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata	[1170100] Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				04	Penguatan kemitraan pemangku kepentingan kepariwisataan, perhotelan, restoran dan transportasi (maskapai, pelaku penyedia jasa pelayaran, penyedia jasa transportasi darat) untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan lama hari berkunjung wisatawan nusantara serta wisatawan asing	001	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	300909	1981190	[2.04.15] Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	[1170100] Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				05	Pengembangan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan yang memberikan sumber penghasilan kolektif bagi komunitas masyarakat	001	Jumlah tenaga kerja yang sudah dilatih disektor formal dan non formal kepariwisataan	715	1.267	[2.04.20] Program Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata	[1170100] Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				06	Peningkatan fasilitas kemitraan UMKM dan koperasi lokal dengan usaha pariwisata berskala besar	001	Pertumbuhan Wirausaha Baru (%)	-	10,00	[1.15.16] Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	[1150100] Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah
12	Meningkatnya kualitas seni budaya lokal	01	Meningkatkan pengembangan kualitas, dan pelestarian warisan seni budaya lokal	01	Peningkatan penyelenggaraan festival budaya lokal di event nasional dan internasional	001	Jumlah pelaku budaya dan lembaga peduli seni budaya yang mendapatkan penghargaan	513	2565	[1.17.15] Program Pengembangan Nilai Budaya	[1170100] Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				02	Peningkatan fasilitas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian kekayaan seni budaya lokal	001	Jumlah benda cagar budaya/situs yang dipelihara dan naskah kuno yang dikelola oleh museum	1.268	1268	[1.17.16] Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	[1170100] Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				03	Peningkatan fasilitas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian kekayaan budaya lokal	001	Jumlah fasilitas pergelaran, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman	185	235	[1.17.17] Program Pengelolaan Keragaman Budaya	[1170100] Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				04	Peningkatan pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum, dan peninggalan bawah air	001	Jumlah benda cagar budaya/situs yang dipelihara dan naskah kuno yang dikelola oleh museum	1.268	1268	[1.17.16] Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	[1170100] Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1	2	3		4		5		6	7	8	9
13	Meningkatnya jumlah izin prinsip dan realisasi PMA, PMDN, dan investasi daerah	01	Meningkatkan iklim investasi yang kondusif	01	Peningkatan investasi dalam negeri (PMDN), dan PMA dengan mendorong kemitraan PMA dan PMDN, serta kebijakan pemanfaatan bahan baku lokal bagi PMA	001	Jumlah minat investasi PMA dan PMDN berdasarkan Izin Prinsip (Trilyun Rupiah)	113,64	604,55	[1.16.15] Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	[1160100] Badan Penanaman Modal
				02	Pengembangan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang diperdagangkan	001	Jumlah nilai realisasi investasi PMA dan PMDN berdasarkan LKPM (Trilyun Rupiah)	68,48	471,07	[1.16.16] Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	[1160100] Badan Penanaman Modal
						001	Jumlah potensi dan peluang investasi (Peluang)	20	30	[1.16.17] Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	[1160100] Badan Penanaman Modal
		02	Meningkatkan kapasitas SDM dan infrastruktur pendukung investasi	01	Peningkatan kapasitas pelayanan perizinan melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan	001	Persentase paket pengadaan barang/jasa yang diselesaikan sesuai rencana umum pengadaan (%)	-	100	[1.16.18] Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	[1160100] Badan Penanaman Modal
						001	Persentase pelayanan perizinan yang tepat waktu sesuai SOP (%)	100	100	[1.16.19] Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	[1160100] Badan Penanaman Modal
		03	Meningkatkan promosi investasi secara terpadu	01	Peningkatan cakupan substansi pameran investasi berskala domestik, nasional, dan internasional	001	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	300909	1981190	[2.04.15] Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	[1170100] Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
14	Meningkatnya kinerja pelayanan, dan pembangunan prasarana transportasi jalan, serta terwujudnya keselamatan, efisiensi dan efektivitas pelayanan angkutan darat, laut, dan udara	01	Meningkatkan konektivitas ekonomi melalui ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal	01	Pengembangan transportasi untuk mendukung sentra produksi agropolitan, dan sumber daya alam lainnya dalam kawasan strategis ekonomi, serta kawasan andalan untuk mendukung sentra produksi pada 38 simpul kabupaten/kota	001	Panjang jalan yang terbangun	0	4.5	[1.03.15] Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	[1030200] Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
						002	Panjang jembatan yang terbangun	0	115		
						001	Panjang jalan dalam kondisi mantap (Km)	1.516,16	189.309	[1.03.18] Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	[1030200] Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
						002	Panjang jembatan dalam kondisi baik	13.442,32	14.952,90		
						001	Panjang jalan JLS yang terbangun	220,35	189.309	[1.03.39] Program Dukungan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	[1030200] Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
						002	Panjang jembatan JLS yang terbangun	3031	4459		
						001	Prosentase peserta Mudik Balik Gratis terakomodasi	1.50	1.50	[1.07.17] Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	[1070100] Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan
				02	Pengembangan pembangunan dermaga/transportasi antar-pulau untuk mendukung penanganan kawasan tertinggal, terutama di wilayah Kepulauan Madura, dan pulau-pulau lainnya	001	rata-rata prosentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang dibandingkan kebutuhan	21,18	36,18	[1.07.19] Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	[1070100] Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan
						001	Prosentase pertumbuhan penumpang pada lintas penyeberangan Jawa Timur	3	3	[1.07.22] Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	[1070100] Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				001	Prosentase pertumbuhan bongkar muat barang pada pelabuhan utama Jawa Timur	5	5	[1.07.23] Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Laut	[1070100] Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan	
				001	Prosentase Jumlah Kabupaten / Kota yang memperoleh predikat Wahana Tata Nugraha dibandingkan jumlah peserta dari Kab/Kota	55	55	[1.07.29] Program Dukungan Sarana Prasarana Transportasi	[1070100] Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan	
			03	Pengembangan jalur komuter perkeretaapian, dan pengembangan rel perkeretaapian ganda (double track)	001	Prosentase penurunan jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api	10	10	[1.07.21] Program Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Perkeretaapian	[1070100] Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan
			04	Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana transportasi jalan	001	Panjang jalan dalam kondisi mantap (Km)	1.516,16	189.309	[1.03.18] Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	[1030200] Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
				002	Panjang jembatan dalam kondisi baik	13.442,32	14.952,90			
	02	Meningkatkan kinerja pelayanan angkutan darat, laut dan udara yang efisien dan efektif	01	Pengembangan perluasan sistem angkutan umum, termasuk busway/monorel	001	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan LLAJ Prov. Jatim	80	81	[1.07.15] Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	[1070100] Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan
				001	Prosentase jumlah prasarana dan fasilitas terpelihara dibandingkan jumlah prasarana dan fasilitas yang dimiliki	50	50	[1.07.16] Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	[1070100] Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan	
				001	Prosentase penurunan jumlah kecelakaan akibat faktor sarana (kendaraan)	10	10	[1.07.20] Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	[1070100] Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan	
				001	Prosentase Jumlah Kabupaten / Kota yang memperoleh predikat Wahana Tata Nugraha dibandingkan jumlah peserta dari Kab/Kota	55	55	[1.07.29] Program Dukungan Sarana Prasarana Transportasi	[1070100] Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan	
			02	Pengembangan terminal kelas A, B dan C, serta optimalisasi terminal kargo dan peti kemas	001	Prosentase Jumlah Kabupaten / Kota yang memperoleh predikat Wahana Tata Nugraha dibandingkan jumlah peserta dari Kab/Kota	55	55	[1.07.29] Program Dukungan Sarana Prasarana Transportasi	[1070100] Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan
			03	Peningkatan pembangunan dan pengembangan pelabuhan umum	001	Prosentase pertumbuhan bongkar muat barang pada pelabuhan utama Jawa Timur	5	5	[1.07.23] Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Laut	[1070100] Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan
			04	Pengembangan pembangunan pelabuhan khusus	001	Prosentase Jumlah Kabupaten / Kota yang memperoleh predikat Wahana Tata Nugraha dibandingkan jumlah peserta dari Kab/Kota	55	55	[1.07.29] Program Dukungan Sarana Prasarana Transportasi	[1070100] Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan
			05	Peningkatan pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Juanda dan Abdul Rahman Saleh Malang	001	Prosentase pertumbuhan penumpang di Bandara Abd. Saleh Malang	5	5	[1.07.24] Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Udara	[1070100] Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
			06	Peningkatan pembangunan dan pengembangan bandar udara perintis untuk penerbangan antar-kota (city link)	001	Prosentase Jumlah Kabupaten / Kota yang memperoleh predikat Wahana Tata Nugraha dibandingkan jumlah peserta dari Kab/Kota	55	55	[1.07.29] Program Dukungan Sarana Prasarana Transportasi	[1070100] Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan	
15	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum, dan sanitasi	01	Meningkatkan kinerja penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi	01	Peningkatan ketersediaan dan cakupan pelayanan air minum dan sanitasi dengan harga terjangkau	001	Persentase Tingkat Pelayanan air Limbah	72,15%	76,14%	[1.03.45] Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi	[1030500] Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
					001	Persentase Tingkat Pelayanan air Bersih	60,96%	66,96%	[1.03.46] Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum	[1030500] Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang	
		02	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat miskin, dan masyarakat berpenghasilan rendah	01	Peningkatan pemenuhan perumahan yang layak huni bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah	001	Persentase Rusun terbangun	39,42%	0.6365	[1.04.15] Program Pengembangan Perumahan	[1030500] Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
					002	Jumlah PSU Perumahan Permukiman dan Dokumen Monev RTLH	50 kawasan PSU dan dokumen monev 50.000 unit RTLH	10			
16	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, dan penyediaan data serta informasi sumber daya air	01	Meningkatkan konservasi sumber daya air secara berkelanjutan	01	Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi waduk, DAM, dan embung	001	Volume resapan air	n/a	31500000	[1.03.42] Program Konservasi Sumber Daya Air	[1030300] Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
				02	Peningkatan rehabilitasi kerusakan daerah tangkapan air (catchment area) dan sumber air	001	Ketersediaan air baku	19340000000 m3	19919562000	[1.03.43] Program Pendayagunaan Sumber Daya Air	[1030300] Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
				03	Peningkatan upaya mempertahankan sumber air, dan merehabilitasi resapan untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun	001	Ketersediaan air baku	19340000000 m3	19919562000	[1.03.43] Program Pendayagunaan Sumber Daya Air	[1030300] Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
		02	Mengendalikan daya rusak air dan Pendayagunaan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat	01	Peningkatan pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi, difokuskan pada peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi areal irigasi berfungsi yang rusak, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan antara lain melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif (PPSIP)	001	Ketersediaan air baku	19340000000 m3	19919562000	[1.03.43] Program Pendayagunaan Sumber Daya Air	[1030300] Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
				02	Peningkatan percepatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur yang menunjang pembangunan sektor pertanian dan wilayah pedesaan	001	Luas genangan pada daerah rawan banjir	n/a	38500	[1.03.44] Program Pengendalian Daya Rusak Air	[1030300] Dinas Pekerjaan Umum Pengairan

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
			03	Peningkatan pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT)	001	Ketersediaan air baku	1934000000 m3	19919562000	[1.03.43] Program Pendayagunaan Sumber Daya Air	[1030300] Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	
			04	Peningkatan pembangunan embung berteknologi geo-membran di lokasi rawan kekeringan, jauh dari sumber air dan kondisi tanah porus, sebagai solusi jangka pendek mengantisipasi bencana kekeringan	001	Jumlah sumur bor di daerah sulit air	7	37	[2.03.27] Program Pengelolaan Air Tanah	[2030200] Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	
17	Meningkatnya infrastruktur dan ketersediaan energi	01	Meningkatkan infrastruktur dan ketersediaan energy dan ketenagalistrikan	01	Peningkatan koordinasi dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi dan ketenagalistrikan	001	Rasio ketersediaan listrik (%)	71,03	74,03	[2.03.25] Program Pengembangan Pemanfaatan Energi, dan Ketenagalistrikan	[2030200] Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
					002	Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan listrik (%)	99,58	99,64			
		02	Meningkatkan pengelolaan pertambangan/ SD Mineral dan Migas	01	Peningkatan koordinasi kegiatan pertambangan/SD Mineral dan Migas	001	Pertambangan tanpa ijin (ha)	1438.08	200	[2.03.29] Program Pengelolaan Pertambangan Umum dan Migas	[2030200] Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
		03	Meningkatkan pengelolaan air tanah	01	Peningkatan pemeliharaan dan pemanfaatan air tanah	001	Jumlah sumur bor di daerah sulit air	7	37	[2.03.27] Program Pengelolaan Air Tanah	[2030200] Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
		04	Meningkatkan penelitian dan pengembangan SD geologi lingkungan dan bencana geologi	01	Peningkatan nilai tambah/manfaat potensi geologi lingkungan dan Early Warning System (EWS) bencana geologi	001	Jumlah Rekomendasi Hasil Kajian Geologi	20	30	[2.03.28] Program Pengembangan Sumber Daya Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi	[2030200] Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
18	Meningkatnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	01	Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan informasi dan komunikasi	01	Pengembangan informasi dan teknologi tepat guna melalui diseminasi informasi dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat	001	Jumlah layanan informasi yang diberikan kepada masyarakat	12	16	[1.25.30] Program Peningkatan Desiminasi dan Informasi	[1250100] Dinas Komunikasi dan Informatika
1	Meningkatnya luas hutan dan/atau lahan kritis yang direhabilitasi	01	Meningkatkan pengendalian, perluasan, dan rehabilitasi hutan	01	Peningkatan rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan hidup, khususnya kawasan hutan, dengan memilih tanaman pohon bermasa tumbuh relatif pendek	001	Cakupan lahan kritis yang terehabilitasi (lokasi)	45	75	[1.08.18] Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	[1080200] Badan Lingkungan Hidup
					001	Rehabilitasi kawasan hutan (ha)		10000	[2.02.23] Program Rehabilitasi Sumber Daya Hutan	[2020100] Dinas Kehutanan	
2	Meningkatnya sumber daya air terkonservasi	01	Meningkatkan upaya konservasi sumber daya air, dan peningkatan fungsi jaringan irigasi	01	Peningkatan upaya konservasi sumber daya air untuk mewujudkan keberlanjutan kapasitas pasok sumber daya air, di samping untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, juga kebutuhan air irigasi pertanian rakyat	001	Cakupan wilayah sumber mata air yang terkonservasi (titik)	300	330	[1.08.17] Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	[1080200] Badan Lingkungan Hidup
					002	Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (%)	100	100			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
			02	Pengembangan penyediaan air irigasi melalui peningkatan fungsi jaringan irigasi, rehabilitasi dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan dengan mempertimbangkan ketersediaan air dan kesiapan petani	001	Reboisasi kawasan Tahura R. Soerjo (Ha)	300	2100	[2.02.17] Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	[2020100] Dinas Kehutanan	
3	Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup terutama sumber daya air, DAS, dan wilayah pesisir, serta laut	01	Meningkatkan partisipasi aktif seluruh stakeholder dalam upaya menjaga sumber daya air, sungai, pesisir dan laut	01	Pengembangan kelembagaan pengelolaan sumber daya air melalui peningkatan peran dan keterlibatan semua pemangku kepentingan (stakeholders), serta menggali dan mengembangkan modal sosial, merevitalisasi peran lokal tradisional dalam pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air untuk irigasi pertanian	001	Rehabilitasi Mangrove	400	50	[2.05.32] Program Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Pengawasan	[2050100] Dinas Perikanan dan Kelautan
					002	Rehabilitasi Terumbu Karang	150	17			
			02	Pemberdayaan komunitas masyarakat yang bertempat tinggal di sepanjang daerah aliran sungai untuk mengawasi pencemaran air sungai, dan memelihara lingkungan hidup	001	Cakupan titik pantau dengan peningkatan kualitas air (menggunakan metode STORET atau metode indeks pencemaran air) (%)	31	36	[1.08.16] Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	[1080200] Badan Lingkungan Hidup	
					002	Cakupan titik pantau dengan peningkatan kualitas udara ambien (menggunakan metode indeks pencemaran udara) (%)	9	14			
					003	Cakupan pengawasan industri dan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan AMDAL dan hukum lingkungan kewenangan provinsi (%)	81	86			
					004	Rasio penyelesaian kasus atau pelanggaran hukum lingkungan hidup dengan Sanksi Administrasi (%)	60	60			
			03	Peningkatan upaya konservasi pesisir dan laut, serta merehabilitasi ekosistem yang rusak, dan menggiatkan kemitraan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut	001	Rehabilitasi Mangrove	400	50	[2.05.32] Program Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Pengawasan	[2050100] Dinas Perikanan dan Kelautan	
					002	Rehabilitasi Terumbu Karang	150	17			
			04	Peningkatan pengembangan mekanisme perlindungan bagi masyarakat dari dampak bencana alam	001	Rakor fasilitasi PRB; Bintek fasilitator desa tangguh; Fasilitasi Desa Tangguh Bencana	38	38	[1.19.38] Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	[1190400] Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
4	Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	01	Melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	01	Peningkatan koordinasi lintas sektor yang berpotensi menghasilkan emisi GRK, terutama sektor energi, transportasi, industri, pertanian, kehutanan dan pengelolaan limbah	001	Jumlah penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (juta ton eq CO2)	100	80	[1.08.31] Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	[1080200] Badan Lingkungan Hidup



1	2	3		4		5		6	7	8	9
5	Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	01	Mengembangkan kawasan strategis dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan wilayah	01	Menetapkan Rencana Kawasan Strategis Provinsi dalam mendorong pengembangan wilayah	001	Prosentase RTR Kawasan Strategis Provinsi yang tersusun	41	100	[1.05.15] Program Perencanaan Tata Ruang	[1030500] Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
						002	Jumlah Rencana Rinci Tata Ruang kabupaten/kota	2	40		
		02	Meningkatkan peran rencana tata ruang sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang provinsi	01	Fasilitasi Upaya Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota untuk dievaluasi oleh Gubernur	001	Prosentase ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang	0	100	[1.05.16] Program Pemanfaatan Ruang	[1030500] Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
		03	Perumusan peraturan/kebijakan sebagai dasar Pemanfaatan ruang di Jawa Timur	01	Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan pemanfaatan ruang	001	Prosentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang	66.66	80	[1.05.17] Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	[1030500] Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
6	Meningkatnya fasilitasi tentang perlindungan terhadap luasan lahan pertanian	01	Menetapkan dan mempertahankan luasan LP2B dalam rangka swasembada beras	01	Peningkatan fasilitasi upaya mendorong luasan LP2B dalam rangka swasembada beras	001	Skor PPH	81,1	87,7	[1.21.26] Program Peningkatan Diversifikasi Pangan	[1210100] Badan Ketahanan Pangan
	<b>Misi 04: Meningkatkan reformasi birokrasi, dan pelayanan publik</b>										
1	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik	01	Meningkatkan efektivitas kelembagaan pemerintahan melalui peningkatan kapasitas SDM, dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai, serta memberi ruang bagi masyarakat untuk pengawasan pelaksanaan pemerintahan	01	Pengembangan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolok ukurnya	001	Persentase ketepatan waktu pembentukan produk hukum Jawa Timur	0.6		[1.20.36] Program Pembentukan Produk Hukum	[1200303] Biro Hukum
						001	Persentase ketepatan waktu penanganan perkara	0.8		[1.20.38] Program Profesionalisme bagi Aparat Hukum	[1200303] Biro Hukum
						001	Rumusan dan Evaluasi Kebijakan (Dokumen)	5	40	[1.20.39] Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian	[1200304] Biro Administrasi Perekonomian
						001	Naskah Kerjasama (PKS & KSB) antar Pemerintah Dalam Negeri	79	44	[1.20.64] Program Peningkatan Kerjasama	[1200302] Biro Administrasi Kerjasama
						002	Naskah Kerjasama dengan Luar Negeri	17	20		
						003	Naskah Kerjasama dengan Lembaga Nasional dan Internasional	55	75		
						001	Jumlah fasilitasi pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Provinsi Jawa Timur	15	39	[1.20.69] Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	[1200301] Biro Administrasi Pemerintahan Umum
						001	Persentase kelembagaan Kab/Kota dan SKPD Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	0	100	[1.20.73] Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	[1200310] Biro Organisasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				001	Persentase waktu upload produk hukum melalui website	0.7		[1.20.80] Program Peningkatan Informasi dan Kesadaran Hukum	[1200303] Biro Hukum		
				001	Prosentase Pelayanan Lingkup Administrasi Kesejahteraan Rakyat	100		[1.20.81] Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat	[1200307] Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat		
				001	Prosentase tersebarluasnya informasi kehumasan dan keprotokolan (persen)	100	100	[1.20.85] Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi	[1200309] Biro Humas dan Protokol		
				001	Persentase tersebar luasnya informasi ke masyarakat	100	100	[1.20.86] Program Peningkatan Kualitas Media dan Dokumentasi	[1200309] Biro Humas dan Protokol		
				001	Prosentase layanan lingkup layanan kantor perwakilan		100	[1.20.88] Program Dukungan Layanan Kantor Perwakilan	[1201200] Kantor Perwakilan Jawa Timur		
				001	Prosentase Komposisi Surat Masuk / Keluar Secara Online	100%	100%	[1.20.93] Program Dukungan Pelayanan Umum	[1200311] Biro Umum		
				002	Prosentase Pengiriman / Penerimaan RDG di Jawa Timur	100%	100%				
				003	Tercatatnya Nilai Aset yang dikelola di Lingkungan Setda	100%	100%				
				001	Prosentase pelaksanaan promosi potensi daerah		100	[1.20.95] Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah	[1201200] Kantor Perwakilan Jawa Timur		
				001	Persentase pelaksanaan pembinaan anggota KORPRI dan kelembagaan unit KORPRI	60 %	90 %	[1.20.99] Program Pembinaan anggota KORPRI dan kelembagaan unit KORPRI	[1201900] Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi		
				002	prosentase layanan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Timur bagi Anggota Aparatur Sipil Negara yang difasilitasi oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Timur	60 %	90 %				
				001	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan (LPMD/K dan TP PKK) yang aktif	50	85	[1.22.24] Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	[1220100] Badan Pemberdayaan Masyarakat		
				001	Jumlah layanan informasi yang diberikan kepada masyarakat	12	16	[1.25.30] Program Peningkatan Desiminasi dan Informasi	[1250100] Dinas Komunikasi dan Informatika		
				001	Persentase tindak lanjut materi penyiaran terhadap jumlah pengaduan	100	100	[1.25.32] Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Media Penyiaran	[1250200] Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah		
				001	Jumlah lembaga komunikasi dan informasi yang diberdayakan	100	1055	[1.25.33] Program Pengelolaan Jaringan Komunikasi	[1250100] Dinas Komunikasi dan Informatika		
				001	Persentase cakupan fasilitasi KPID Jatim	100	100	[1.25.34] Program Fasilitasi KPID	[1250200] Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah		
				001	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	100%	[x.xx.02] Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Seluruh SKPD		
		02	Meningkatkan manajemen aparatur secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik secara profesional	01	Peningkatan efesiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik	001	Prosentase penetapan pemberian penghargaan kinerja pegawai yang obyektif, transparan dan akuntabel	50	100	[1.20.41] Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	[1201700] Badan Kepegawaian

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				001	Jumlah Alumni Diklat Pra Jabatan Kepemimpinan, Teknis dan fungsional	1340		[1.20.50] Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	[1201800] Badan Pendidikan dan Pelatihan		
				001	Persentase komposisi aparatur yang sesuai standar pada Kab/Kota dan SKPD Prov. Jatim	5	80	[1.20.74] Program Penyusunan Standar Komposisi Aparatur	[1200310] Biro Organisasi		
				001	Persentase Kab/Kota dan SKPD Prov yang telah menerapkan ketatalaksanaan pemerintahan sesuai ketentuan	100	100	[1.20.77] Program Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	[1200310] Biro Organisasi		
				002	Persentase Kab/Kota dan SKPD Prov yang telah menyusun SOP dan menerapkan Pelayanan Prima	35,44	97,31				
				001	Persentase Cakupan Layanan Keprotokolan	100	100	[1.20.87] Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	[1200309] Biro Humas dan Protokol		
				001	Persentase penataan SDM aparatur sesuai dengan formasi kebutuhan	50	100	[1.20.94] Program Penyelenggaraan pelayanan manajemen aparatur	[1201700] Badan Kepegawaian		
				001	Pemenuhan standart kompetensi aparatur	165 orang	949 orang	[1.20.98] Program Penilaian dan sertifikasi Aparatur	[1201800] Badan Pendidikan dan Pelatihan		
				001	Jumlah Telecenter yang terbangun	40	80	[1.25.25] Program Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	[1250100] Dinas Komunikasi dan Informatika		
				001	Jumlah SKPD yang terlayani Data Center	51	376	[1.25.26] Program Pengembangan Teknologi Informatika	[1250100] Dinas Komunikasi dan Informatika		
				001	Jumlah pemeliharaan jaringan TIK skpd prov jatim	32	52	[1.25.27] Program Pemeliharaan dan Pengendalian Infrastruktur Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK)	[1250100] Dinas Komunikasi dan Informatika		
				001	Jumlah Ijin Penyelenggaraan Pos	91	144	[1.25.28] Program Pos dan Telekomunikasi	[1250100] Dinas Komunikasi dan Informatika		
				001	persentase tindaklanjut pengaduan masyarakat terhadap sengketa informasi	80	100	[1.25.31] Program Fasilitasi Komisi Informasi Provinsi	[1250100] Dinas Komunikasi dan Informatika		
				001	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	100%	100%	[x.xx.07] Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Seluruh SKPD		
2	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	01	Meningkatkan penerapan prinsip tata kelola yang baik secara konsisten	01	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaksanaan standar pelayanan minimal serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) dan pengawasan masyarakat.	001	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	70	75	[1.20.20] Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	[1200600] Inspektorat Propinsi
				001	persentase aparatur pengawasan dengan nilai post test minimal 70	0	70	[1.20.21] Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	[1200600] Inspektorat Propinsi		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				001	Jumlah prosedur dan kebijakan pengawasan bagi aparat pengawasan	2 buah	12 buah	[1.20.22] Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	[1200600] Inspektorat Propinsi		
				001	Opini BPK terhadap LKPD Provinsi Jawa Timur	WTP	WTP	[1.20.92] Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	[1200600] Inspektorat Propinsi		
			02	001	Penguatan aksi anti-korupsi, dan pemberantasan korupsi, serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	0	10	[1.20.79] Program Pencegahan Korupsi	[1200600] Inspektorat Propinsi		
				001	Prosentase Tingkat Pelayanan Administrasi Pembangunan	45%	100000	[1.20.84] Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan	[1200305] Biro Administrasi Pembangunan		
			20	001	Peningkatan akses informasi publik secara akurat dan up to date	30	100	[1.20.31] Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	[1200310] Biro Organisasi		
				001	Tersedianya dokumen Tata Kelola Pemerintahan yg baik	38	38	[1.20.54] Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	[1200301] Biro Administrasi Pemerintahan Umum		
				001	Persentase SAKIP Kab/Kota di Jatim yang berpredikat A (sangat baik)	30	100		[1200310] Biro Organisasi		
				002	Persentase SAKIP SKPD Prov. Jatim yang berpredikat A (sangat baik)	17	100				
				003	Persentase SKPD Prov dan SKPD Kab/Kota yang memiliki KBK	5,61	50				
				001	Rumusan dan Evaluasi Kebijakan (Dokumen)		40	[1.20.91] Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang SDA	[1200306] Biro Administrasi Sumber Daya Alam		
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan	01	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian secara terpadu antar dan lintas SKPD	01	Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta sinergi perencanaan pembangunan antar dan lintas SKPD	001	Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	30	40	[1.06.21] Program Perencanaan Pembangunan Daerah	[1060100] Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi
				001	Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	42	54	[1.06.22] Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	[1060100] Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi		
				001	persentase data dan informasi serta pelaporan perencanaan pembangunan	70	80	[1.06.36] Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	[1060100] Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi		
				002	persentase program dan kegiatan RKPD dalam APBD	83	95				
				003	persentase SKPD Provinsi dan kabupaten/kota yang melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan secara tepat waktu	58	70				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				001	Jumlah Kegiatan yang difasilitasi	7	6	[1.06.37] Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah	[1060100] Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi
				001	Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Prasarana Wilayah yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan	30	40	[1.06.38] Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	[1060100] Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi
				001	Persentase Proyeksi Kapasitas Keuangan Daerah terhadap Penetapan Kapasitas Keuangan Daerah dalam Dokumen Perencanaan	100	100	[1.06.39] Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan	[1060100] Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi
				001	Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Pengembangan Regional yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan	26	36	[1.06.40] Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional	[1060100] Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi
				001	Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan	18	32	[1.06.43] Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan	[1060100] Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi
				001	Jumlah Penelitian yang dihasilkan	70	106	[1.20.33] Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	[1200500] Badan Penelitian dan Pengembangan
				001	Persentase hasil penelitian dan pengembangan serta kajian yang didiseminasikan	30	55	[1.20.71] Program Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Serta Kajian	[1200500] Badan Penelitian dan Pengembangan
				001	Persentase Cakupan fasilitasi dalam melaksanakan SIDA Jatim	8	28	[1.20.76] Program Pendampingan SIDA Kab/Kota di Jawa Timur	[1200500] Badan Penelitian dan Pengembangan
				001	Prosentase (%) Jumlah koordinasi, fasilitasi dan monev yang ditindaklanjuti	53	63	[1.20.96] Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	[1201300] Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim (BAKORPEMBANG) I Madiun
				001	Prosentase (%) Jumlah koordinasi, fasilitasi dan monev yang ditindaklanjuti	40	67		[1201400] Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim (BAKORPEMBANG) II Bojonegoro
				001	Prosentase (%) Jumlah koordinasi, fasilitasi dan monev yang ditindaklanjuti	56	68		[1201500] Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim (BAKORPEMBANG) III Malang
				001	Prosentase (%) Jumlah koordinasi, fasilitasi dan monev yang ditindaklanjuti	51	61		[1201600] Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim (BAKORPEMBANG) IV Pamekasan
				001	Prosentase jumlah keterisian data dan informasi	55%	65%	[1.20.97] Program pengembangan Data Informasi	[1201300] Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim (BAKORPEMBANG) I Madiun

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				001	Prosentase (%) Jumlah keterisian data dan informasi kegiatan yang dilaksanakan	45	60	[1201400] Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim (BAKORPEMBANG) II Bojonegoro			
				001	Prosentase (%) Jumlah keterisian data dan informasi kegiatan yang dilaksanakan	55	75	[1201500] Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim (BAKORPEMBANG) III Malang			
				001	Prosentase (%) Jumlah keterisian data dan informasi kegiatan yang dilaksanakan	53	63	[1201600] Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim (BAKORPEMBANG) IV Pamekasan			
				001	Persentase database yang berkualitas, relevan, terkini, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan	70	100	[1201700] Badan Kepegawaian			
				001	persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100	100	[x.xx.11] Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan			
4	Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya	01	Meningkatkan kapasitas SDM legislatif sesuai dengan fungsinya	01	Peningkatan kapasitas anggota legislatif beserta kelembagaannya secara berkelanjutan	0.2	20 Buah	[1.20.15] Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	[1200400] Sekretariat DPRD		
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	01	Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	01	Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu	001	Tingkat Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9.464.416.237.214	89.41	[1.20.17] Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	[1200700] Dinas Pendapatan Daerah
				002	Tingkat Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.127.286.400.141	60.00				
				003	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87.56	89.5				
				004	Jumlah Ruang Lingkup/Jenis Pelayanan yang Menerapkan SMM ISO 9001-2008	4	1				
				005	Jumlah Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	4.631.966	45.00				
				001	Rancangan Peraturan Daerah (APBD, PAPBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD)	3	3		[1200800] Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)		
				002	Rancangan Peraturan Gubernur ttg Penjabaran APBD, PAPBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3	3				
				003	Jumlah sertifikat aset tetap tanah	108	550				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				001	Keputusan Gubernur TTg Evaluasi Rancangan APBD, P-APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota se Jatim	38	38	[1.20.18] Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	[1200800] Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
				001	persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100	100	[x.xx.11] Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Seluruh SKPD
6	Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal, serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas	01	Meningkatkan pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi, dan handal	01	Peningkatan pengelolaan arsip pemerintah daerah secara profesional yang didukung sistem kearsipan yang komprehensif	100	120	[1.24.15] Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	[1260100] Badan Perpustakaan dan Kearsipan
				002	Jumlah SKPD yang menerapkan arsip secara baku	9	59		
				001	Jumlah arsip yang menjadi bahan informasi	72	30	[1.24.16] Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	[1260100] Badan Perpustakaan dan Kearsipan
				001	Indeks kepuasan masyarakat layanan kearsipan	77,49	78,25	[1.24.18] Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi (Kearsipan)	[1260100] Badan Perpustakaan dan Kearsipan
				001	Indeks kepuasan masyarakat/aparaturnya terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	100%	100%	[x.xx.01] Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Seluruh SKPD
7	Mewujudkan sistem penanggulangan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	01	Menguatkan tata kelola kelembagaan pemerintahan, koordinasi lintas sektor dan wilayah dalam penanggulangan bencana (pra, tanggap, pasca bencana)	01	Mengembangkan sistem penanggulangan bencana yang berbasis tata kelola pemerintahan, responsiv, transparan dan akuntabel.	100	100	[1.13.38] Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	[1130100] Dinas Sosial
				001	Rakor fasilitasi PRB; BinteK fasilitator desa tangguh; Fasilitasi Desa Tangguh Bencana	38	38	[1.19.38] Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	[1190400] Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		02	Menguatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	01	Menciptakan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana	38	38	[1.19.36] Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	[1190400] Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				02	Peningkatan pengembangan mekanisme perlindungan bagi masyarakat dari dampak bencana alam	38	38	[1.19.37] Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	[1190400] Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		03	Penyediaan alokasi pendanaan pada saat status darurat bencana (siaga, tanggap, transisi)	01	Pemenuhan kebutuhan pada saat status darurat bencana yang pendanaannya dialokasikan khusus untuk BPBD yang dititipkan melalui dana BTT (BPKAD) dan pencairannya melalui SK Status Keadaan Darurat Bencana	38	38	[1.19.39] Program Penyusunan Perencanaan, Fasilitasi dan Monev Penanggulangan Bencana	[1190400] Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	<b>Misi 05: Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial</b>										
1	Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan	01	Meningkatkan fasilitas layanan keagamaan melalui bantuan dan koordinasi antara pemangku kepentingan dan pemerintah	01	Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.	001	Dukungan Layanan Lingkup Administrasi Kemasyarakatan	70	90	[1.20.83] Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan	[1200308] Biro Administrasi Kemasyarakatan
				02	Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agama, serta beribadat sesuai agama dan kepercayaan masing-masing	001	Dukungan Layanan Lingkup Administrasi Kemasyarakatan	70	90	[1.20.83] Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan	[1200308] Biro Administrasi Kemasyarakatan
2	Meningkatnya komunikasi antar-umat beragama	01	Meningkatkan kerukunan antar-umat beragama melalui berbagai forum dialog sosial maupun ekonomi	01	Peningkatan dan memperkuat kerukunan internal, dan antar-umat beragama untuk menciptakan harmoni sosial berlandaskan sikap toleran dan saling menghormati	001	Jumlah kejadian terkait keagamaan	8	7 Kab/kota	[1.19.35] Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	[1190100] Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						002	Jumlah kejadian terkait keagamaan		38 Kab/kota		
						003	Jumlah kejadian terkait keagamaan	0	0		
				02	Peningkatan jaringan kerja sama lintas umat beragama, dan forum silaturahmi lintas pemuka agama, serta mendorong berkembangnya kerja sama internal dan/atau antar-umat beragama di bidang sosial ekonomi	001	Dukungan Layanan Lingkup Administrasi Kemasyarakatan	70	90	[1.20.83] Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan	[1200308] Biro Administrasi Kemasyarakatan
				03	Pengembangan resolusi konflik dalam mengatasi konflik sosial berdimensi agama, suku, ras maupun antar-golongan	001	Jumlah kejadian terkait keagamaan	8	7 Kab/kota	[1.19.35] Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	[1190100] Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						002	Jumlah kejadian terkait keagamaan		38 Kab/kota		
						003	Jumlah kejadian terkait keagamaan	0	0		
3	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tenteram, nyaman, dan tertib	01	Memelihara kewaspadaan nasional agar terhindar dari upaya pemecahbelahan bangsa (disintegrasi bangsa) melalui gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban	01	Revitalisasi keamanan berbasis komunitas untuk mewujudkan keamanan lingkungan, termasuk mencegah tumbuhnya permasalahan yang berkaitan penggunaan dan penyebaran narkoba, serta terorisme	001	Jumlah kejadian terkait Poleksosbud, TIBMAS dan terbentuknya FKDM	85 kec	664 kec	[1.19.32] Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	[1190100] Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						002	jumlah kejadian terkait POLEKSOSBUD dan TIBMAS	0	0		
						003	terbentuknya FKDM	125 kec, 1200 desa/kel	664 kec, 7722 desa/kel		
						001	Jumlah kejadian terkait konflik politik	0	38 Kab / Kota	[1.19.33] Program Perbaikan Proses Politik	[1190100] Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



1	2	3		4		5		6	7	8	9
		02	. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan komunitas	01	Peningkatan peran serta masyarakat dalam penciptaan keamanan dan ketertiban melalui mekanisme community policing	001	Persentase penurunan gangguan terhadap kegiatan pemerintahan	100	70	[1.19.15] Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	[1190300] Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
						001	persentase menurunnya pelanggaran Perda Prov. Jatim	100	70	[1.19.16] Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	[1190300] Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
		03	Meningkatkan aktivitas yang mendorong rasa kebanggaan kebangsaan (nasionalisme), dan sikap saling menghormati antar-sesama melalui pengembangan wawasan kebangsaan yang berkesinambungan	01	Peningkatan fasilitasi aktivitas yang menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme, akhlak mulia, serta kemampuan untuk hidup bersama dalam masyarakat multikultur	001	Jumlah Ormas/LSM yang terdaftar	953	1353	[1.19.26] Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	[1190100] Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						002	jumlah ormas/LSM yang terdaftar	953 organisasi	1273 organisasi		
						003	verifikasi bantuan keuangan partai politik	10 partai politik	10 partai politik		
4	Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial	01	Meningkatkan kualitas, dan pelestarian warisan budaya, serta tradisi lokal	01	Revitalisasi budaya dan tradisi lokal untuk mendukung pembangunan partisipatoris berbasis komunitas	001	Jumlah benda cagar budaya/situs yang dipelihara dan naskah kuno yang dikelola oleh museum	1.268	1268	[1.17.16] Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	[1170100] Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				02	Pengembangan dan pemanfaatan kearifan lokal untuk pemberdayaan masyarakat	001	jumlah kab/kota yang menindaklanjuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	12 kab/kota	38 kab/kota	[1.19.19] Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	[1190100] Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						001	Jumlah anggota Satlinmas dan masyarakat yang sigap dan tanggap dalam Pamswakarsa dan penanggulangan bencana	236.040 org	900		[1190300] Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
5	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan HAM	01	Meningkatkan sosialisasi mengenai hukum dan HAM	01	Mengembangkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia di dalam berdemokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum	001	Jumlah kejadian terkait HAM	5 Kab/Kota	0	[1.19.25] Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	[1190100] Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						002	jumlah kejadian terkait HAM	0	0		
6	Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat menjunjung supremasi hukum, dan penghormatan terhadap HAM	01	Meningkatkan kegiatan forum masyarakat dalam bidang hukum dan HAM	01	Mendorong pembentukan dan pengembangan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	001	Jumlah terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	14 Kab/Kota	38 Kab/kota	[1.19.17] Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	[1190100] Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						002	jumlah terbentuknya forum pembauran kebangsaan (FPK)	14 kab/kota	38 kab/kota		
7	Meningkatnya penguatan civil society dalam bidang hukum dan HAM	01	Meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat/LSM dalam bidang hukum dan HAM	01	Meningkatkan keberdayaan organisasi kemasyarakatan/LSM dalam mencegah, dan mengevaluasi ketidakadilan, diskriminasi, serta pelanggaran HAM lainnya, sebagai bagian penguatan civil society	001	Jumlah Ormas/LSM yang terdaftar	953	1353	[1.19.26] Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	[1190100] Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						002	jumlah ormas/LSM yang terdaftar	953 organisasi	1273 organisasi		
						003	verifikasi bantuan keuangan partai politik	10 partai politik	10 partai politik		